

ABSTRAK

RIZA HENDRIANI NPM : 2022551 “PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) BAGI ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BANKESBANGPOL) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA” di bawah bimbingan **Bapak Sugianor, S.Sos., M.AP**, sebagai Pembimbing I dan **Bapak Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing II.

Salah satu pelayanan Bankesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pelayanan usulan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas tidak berbadan hukum namun Organisasi Kemasyarakatan tersebut belum diproses penerbitan SKTnya. Belum adanya sosialisasi dan edukasi dan Kurangnya kejelasan prosedur atau persyaratan pendaftaran SKT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Dengan mengumpulkan data dalam bentuk data dan kalimat melalui observasi, wawancara, serta dokumen/metode. Sumber data diambil melalui penarikan informan secara *Purposive sampling* dengan cara sengaja dan langsung kepada bagian dapat mewakili informan yang ada jumlah 14 orang. Teknik analisis data dengan data reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas Tidak Berbadan Hukum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik dapat dilihat dari Variabel dan indikator berikut: Pertama, Transparansi, Keterbukaan pelayanan belum baik informasi belum disampaikan dengan baik. Prosedur pelayanan belum baik belum dilaksanakan pada upload data pada aplikasi SIOLA. Kemudahan informasi belum baik. Kedua, Akuntabilitas, Kinerja pelayanan publik belum baik karena belum ada upload data ormas tidak berbadan hukum pada tahun 2025. Biaya pelayanan sudah baik, tidak ada biaya. Produk Pelayanan belum baik SKT belum terbit. Ketiga, Kondisional, efisien belum baik upload data ormas pada aplikasi belum ditemukan. Eefektif belum baik masih banyak ormas yang belum berhasil mendapatkan SKT. Keempat, Partisipatif, peran masyarakat sudah cukup baik. Harapan masyarakat belum baik belum berhasil mendapatkan legalitas. Kelima, Kesamaan Hak, ketegasan sudah baik. Tidak diskriminasi sudah baik. Keenam, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, kewajiban pemberi layanan belum baik ada tahapan yang masih belum dilaksanakan petugas. Hak penerima pelayanan belum baik petugas belum melakukan upload data usulan SKT. Faktor Yang pendukungnya adalah Tidak ada biaya dalam pelayanan, Ketegasan petugas dalam pelayanan, Pelayanan yang adil dan sama/ tidak diskriminasi. Untuk Faktor penghambatnya adalah Keterbatasan Anggaran, Jumlah Pegawai yang mahir pengelolaan Ormas kurang memadai, dan Belum maksimalnya waktu penyelesaian SKT.

Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas Tidak Berbadan Hukum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan kepada Kepala Badan Kesbangpol. Mengusulkan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta meningkatkan konsolidasi melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri agar waktu penerbitan SKT bagi Ormas tidak berbadan hukum cepat terbit. Kepada Kepala Bidang Politik dan Organisasi Agama, Masyarakat agar Membuat rencana kerja anggaran untuk kegiatan yang lebih terarah. Kepada Ormas Mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran SKT. Mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bankesbangpol.

ABSTRACT

RIZA HENDRIANI NPM: 2022551 "REGISTRATION SERVICES FOR REGISTERED CERTIFICATES (SKT) FOR NON-INSTITUTED CIVIL ORGANIZATIONS AT THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY (BANKESBANGPOL) OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY" under the guidance of Mr. Sugianor, S.Sos., M.AP, as Supervisor I and Mr. Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP as Supervisor II.

One of the services provided by Bankesbangpol in Hulu Sungai Utara Regency is the service of submitting proposals for Registered Certificates (SKT) for non-incorporated CIVIL ORGANIZATIONS, but the SKT has not yet been issued. This is due to the lack of socialization and education, and the lack of clarity regarding SKT registration procedures or requirements. This study aims to determine the factors influencing the registration service for Registered Certificates (SKT) for non-legal organizations at the National Unity and Politics Agency (BANKESBANGPOL) in Hulu Sungai Utara Regency.

The study employed a qualitative approach with a descriptive-qualitative approach. Data were collected in the form of sentences and sentences through observation, interviews, and documents/methods. Data sources were obtained through purposive sampling, intentionally and directly selecting informants from 14 representative informants. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, conclusions, and verification. Credibility was tested through extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, and member checking.

The Registration Service for Registered Certificates (SKT) for Non-Legal Organizations at the National Unity and Politics Agency (BANKESBANGPOL) in Hulu Sungai Utara Regency is still lacking, as evidenced by the following variables and indicators: First, Transparency. Service openness is lacking, information is not conveyed effectively. Service procedures have not been implemented properly when uploading data to the SIOLA application. Accessibility to information is still lacking. Second, Accountability: Public service performance is not yet good because there has been no upload of data for non-legal organizations in 2025. Service costs are good, there are no fees. Service products are not yet good; SKTs have not been issued. Third, Conditional: Efficiency is not yet good; uploading of mass organization data to the application has not been found. Effectiveness is not yet good; many mass organizations have not yet succeeded in obtaining SKTs. Fourth, Participatory: Community participation is quite good. Community expectations are not yet good; they have not succeeded in obtaining legality. Fifth, Equal Rights: Firmness is good. Non-discrimination is good. Sixth, Balance of Rights and Obligations: Service provider obligations are not yet good; there are stages that have not been implemented by officers. The rights of service recipients are not yet good; officers have not uploaded data for SKT proposals. Supporting factors are No fees for services, Firmness of officers in services, Fair and equal service/non-discrimination. Inhibiting factors are Budget Limitations, Inadequate number of employees skilled in managing mass organizations, and Suboptimal time for SKT completion.

Improving Registration Services for Registered Certificates (SKT) for Non-Legal Organizations at the National Unity and Politics Agency (Bankesbangpol) of Hulu Sungai Utara Regency is expected to the Head of the Kesbangpol Agency. Propose additional budget for the implementation of socialization and education and increase consolidation through the Director General of Politics and General Government at the Ministry of Home Affairs so that the issuance time for SKT for non-legal organizations is quickly issued. To the Head of the Political and Religious Organizations Division, Community to make a budget work plan for more targeted activities. To the Mass Organizations Prepare all the requirements needed for SKT registration. Follow the procedures determined by Bankesbangpol.